

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Discussion, Round Table. 2002. *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan Anak*. Jakarta.
- Djamil, Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa
- Hernoko, Agus Yudha. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Indah S, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Miharja, Marjan. 2019. *Efektivitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Penerapan Undang-Undang Republikk Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasuruan: Qiara Media
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas.
- Siku, Abdul Salam. 2016. *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Indonesia Prime.
- Silaneloe, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Pers.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanjung, Fahmi. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban (Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi)*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia

Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

zulkarnaen, Iskandar. 2015. *Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Yogyakarta : Deepublish.

### **Skripsi/Tesis:**

Sondang Kristine. 2012. *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi)*. Tesis. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Dian Eka Putri Ismail. 2017. *Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.

Sintha Utami Firatria. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Mahangga Ranantha Suari. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha.

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Perasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan

Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Manusia Yang Berat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4171.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367.

Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pegangkatan Anak.

Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941.

Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.MDN.

